



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Gedung BPKP Pusat Lantai 7, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon/Faksimili 021-85910030/85910031
E-mail rokumas@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-722/SU04/3/2019

15 Juli 2019

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Kinerja Biro Hukum dan
Komunikasi Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2019

Yth.
Sekretaris Utama
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi (Rokumasi) sampai dengan Triwulan (TW) II Tahun 2019. Laporan ini kami susun berdasarkan perjanjian kinerja Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2019 karena belum dilaksanakan revisi Perjanjian Kinerja berdasarkan struktur organisasi yang baru.

1. Output

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019, Rokumasi merencanakan *output* sebanyak 15 Kegiatan Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, 30 laporan Telaahan dan Bantuan Hukum, 31 laporan layanan Humas dan HAL dan 1 Kegiatan layanan penyusunan program/rencana kerja dan evaluasi. Target dan realisasi *output* sampai dengan Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Target dan Realisasi *Output* s.d. TW II 2019

No.	IKK	Output Kinerja				Capaian (%)	
		Satuan	Target		Realisasi	Tahun 2019	s.d. TW II 2019
			Tahun 2019 (Perkin)	s.d. TW II 2019	s.d. TW II 2019		
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	15	4	6	40.00	150.00
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Laporan	30	14	12	40.00	85.71
3	Jumlah Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	Laporan	31	15	11	35.48	73.33
4	Jumlah Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi	Kegiatan	1	0	0	0.00	0.00

Realisasi *output* sampai dengan TW II tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut:

a. Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja kegiatan “Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan” diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 terdapat 6 realisasi output berupa kegiatan atau mencapai 150% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 4 kegiatan,

b. Layanan Penelaahan Hukum dan Bantuan Hukum

Indikator kinerja “Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum” diukur dengan menghitung jumlah laporan Penelaahan Hukum dan Penanganan Bantuan Hukum yang dihasilkan.

Sampai dengan TW II Tahun 2019 terdapat 14 realisasi *output* berupa laporan atau mencapai 100% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 14 Laporan.

c. Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga

Indikator kinerja “Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga” diukur dari jumlah Laporan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga yang dihasilkan.

Sampai dengan TW II Tahun 2019 terdapat 11 realisasi *output* berupa laporan atau mencapai 73.33% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 15 Laporan, hal ini dikarenakan penyusunan majalah Warta Pengawasan yang menjadi output masih dalam proses cetak serta kegiatan pameran dan workshop kehumasan juga dilakukan pada semester II Tahun 2019.

d. Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi

Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi ini merupakan pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi, pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

Indikator kinerja “Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi” diukur dari jumlah Kegiatan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi yang dihasilkan.

Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi hanya 1 (satu) output dan di akhir tahun anggaran.

2. Program Kerja Administrasi Umum (PKAU)

PKAU Biro Hukum dan Komunikasi meliputi Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum; Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga; dan Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi. Target dan realisasi kegiatan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Target dan Realisasi Kegiatan PKAU s.d. TW II 2019

No.	IKK	Kegiatan PKAU (PP)			Capaian (%)		Realisasi Laporan	% Real. Laporan terhadap Real PP
		Target		Realisasi	Tahun 2019	s.d. TW II 2019		
		Tahun 2019	s.d. TW II 2019	s.d. TW II 2019				
		Jumlah	Jumlah	2019		2019	s.d. TW II 2019	
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	15	4	6	40.00	150.00	6	150.00
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	30	14	12	40.00	85.71	12	85.71429
3	Jumlah Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	31	15	11	35.48	73.33	11	73.33
4	Jumlah Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi	1	0	0	0.00	0.00	0	0
	Jumlah	77	33	29	37.66	87.88	29	87.88

Kegiatan PKAU untuk IKK Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi tidak terdapat target dalam Triwulan II Tahun 2019.

3. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai pada Biro Hukum dan Humas sebanyak 40 orang terdiri dari 10 orang pejabat struktural, 11 PFA, 1 PFT, dan 18 PFU. Penggunaan hari produktif sampai dengan TW II Tahun 2019 adalah sebanyak 2.090 OH atau sebesar 90,46% dari rencana target s.d. TW II 2019 sebanyak 2.310 OH dan tercapai 37,69 % dari rencana tahun 2019 sebanyak 5.545 OH. Target dan realisasi penggunaan hari produktif disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Target dan Realisasi Hari Produktif s.d TW II Tahun 2019

No.	IKK	OH			Capaian (%)	
		Target		Realisasi	Tahun 2019	s.d. TW II 2019
		Tahun 2019	s.d. TW II 2019	s.d. TW II 2019		
		Jumlah	Jumlah	2019		
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	1,896	948	936	49.37	98.73
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	2,259	1,130	1,066	47.19	94.34
3	Jumlah Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	1,120	560	598	53.39	106.79
4	Jumlah Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi	270	135	0	0.00	0.00
	Jumlah	5,545	2,773	2600	46.89	93.78

Tabel 3 menunjukkan penggunaan OH pada IKK Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi belum ada, hal ini dikarenakan target IKK akan dilaksanakan pada akhir tahun.

4. Penyerapan Anggaran

Anggaran Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2019 sebesar Rp2.608.689.000,00. Rincian rencana dan realisasi penyerapan disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4.
Penyerapan Anggaran s.d TW II 2019

No.	IKK	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	
		Tahun 2019	s.d. TW II 2019	s.d. TW II 2019	Tahun 2019	s.d. TW II 2019
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7 = 5/4
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	504,054,000.00	166,346,000.00	231,647,020.00	45.96	139.26
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	907,496,000.00	281,200,000.00	578,938,738.00	63.80	205.88
3	Jumlah Layanan Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	1,129,559,000.00	430,332,700.00	379,733,633.00	33.62	88.24
4	Jumlah Layanan Penyusunan Program/Rencana Kerja dan Evaluasi	67,560,000.00	9,390,000.00	10,632,700.00	15.74	-
	Jumlah	2,608,669,000	887,268,700.00	1,200,952,091.00	46.04	135.35

Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II 2019 sebesar Rp1.200.952.091,00 atau sebesar 135.35% dari rencana Triwulan II 2019 dan tercapai 46.04% dari rencana tahun 2019 sebesar Rp2.608.689.000,00.

Demikian Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan Triwulan II 2019 Tahun 2019 kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro,

ttd

Syaifudin Tagamal